

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan partai politik. Karena Partai politik muncul sebagai penghubung antara rakyat, di satu sisi, dan negara di sisi yang lain. Muncul dengan satu dasar pemikiran bahwa dengan keberadaan partai politik, maka aspirasi rakyat akan dapat lebih terwadahi dan memiliki aksentuasi yang lebih kuat untuk turut mempengaruhi proses politik. Konsep pemilihan umum dan partai politik menemukan benang merahnya sebagai dua entitas yang muncul untuk menjamin kedaulatan rakyat yang merupakan ciri sistem politik demokratis. Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih siapa yang akan mewakilinya untuk memegang kekuasaan, sedangkan partai politik memungkinkan rakyat untuk turut bersaing dalam pemilu dan memperebutkan kekuasaan.

Adanya banyak kepentingan pribadi kelompok yang harus diutamakan mengakibatkan terjadinya permainan politik, dimana keputusan-keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat lahir dari tawar menawar yang berujung pada money politik, dimana kekuasaan yang semestinya milik rakyat justru menjadi milik segelintir orang yang memiliki akses besar dalam berbagai keputusan yang tidak memihak rakyat.

Hal demikianlah yang menjadikan adanya krisis kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan para politisi. Sebagai komunitas besar yang memilih dan mendukung partai politik, mereka merasa tidak hanya di bodohi tetapi juga bisa dibalang mereka telah dihianati dan ujungnya masyarakat menjadi kurang empati terhadap partai politik.

Kehidupan manusia didalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga Negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-

praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Kota Yogyakarta yang merupakan barometer politik di Indonesia juga melakukan perannya dalam meningkatkan demokrasi ditingkat daerah yaitu dengan menyelenggarakan pemilu guna untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang nantinya diharapkan dapat mengemban semua tugas-tugas yang ada untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan serta kebutuhan masyarakat secara mayoritas bukan minoritas. Dalam fenomena ini besar harapan masyarakat supaya calon yang terpilih tidak melupakan janji-janji yang mereka usung pada saat kampanye.

Agar masyarakat dapat berperan serta dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik adalah media.

Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah. Komunikasi ini diharapkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana.

Sebagai lembaga sosial, media adalah sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya media berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap sasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input.

Ada banyak peranan yang dilakukan oleh media dalam suatu negara dan dalam mewujudkan demokrasi. Namun, agar media massa mampu menjalankan peranannya terutama dalam menunjang demokratisasi maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara profesional. Media massa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara dan dengan demikian adanya kendali atas negara oleh rakyat, sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa maka terhambatnya cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di negara ini. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada (Harsono Suwardi, 1993 : 23).

Oleh karena itu informasi yang diperoleh melalui berbagai media massa memegang peranan sangat penting dalam membentuk sikap mental masyarakat. Namun dalam pemberian informasi kepada masyarakat ada masalah-masalah yang harus dihadapi:

1. Pemastian penerimaan informasi.
2. Informasi lintas batas (*Transfrontier*)
3. Informasi tepat waktu (*timely information*)
4. Informasi lengkap (*comprehensive information*)
5. Informasi yang dapat dipahami (*comprehensible information*)

(Koesnadi, 1988: 141-144).

Adanya permasalahan ini menuntut bahwa informasi yang dibutuhkan, diharapkan akan memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat. Dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa;

"Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan penyelenggaraan dan badan lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)" maka secara jelas dinyatakan bahwa di samping pemerintah selaku pembina dan penyelenggara telekomunikasi pihak swasta dapat juga berperan serta baik perseorangan maupun badan

hukum. Ketentuan ini berimplikasi kepada media elektronik, televisi maupun radio, sehingga pada saat ini telah berdiri sejumlah televisi swasta dan radio swasta.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat media komunikasi milik pemerintah, TVRI dan RRI, dan media komunikasi swasta yaitu radio siaran swasta FM dan AM yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi mengenai pemilukada termasuk radio Geronimo, Unisi, dan Prambors. Ketiga radio tersebut memiliki segmentasi pendengar yang sangat luas dan memiliki informasi/program mengenai pemilukada. Informasi tersebut dapat dikemas dalam bentuk acara khusus maupun dengan memasukkan pesan ke dalam acara tertentu, berbanding terbalik dengan radio siaran pemerintah yang program/acaranya sangat formal.

Radio merupakan salah satu media yang efektif bagi masyarakat karena jangkauannya yang luas dan dapat menembus berbagai lapisan masyarakat. Radio sering ditempatkan sebagai "sahabat" yang dapat menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Selain itu, radio pun dapat berfungsi sebagai alat penghibur, penyampai informasi, dan melaksanakan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Siaran radio merupakan kombinasi yang menggunakan simbol audio (suara) yang disiarkan dari stasiun pemancar radio dan diterima khalayak melalui pesawat penerima. Dalam mempersiapkan acara siaran radio harus memperhatikan beberapa faktor yang menentukan efektifitas siaran tersebut, yaitu :

1. Faktor situasional atau lingkungan
2. Cara atau metode penyampaian
3. Materi siaran itu sendiri

Peranan penting radio swasta adalah dalam rangka sosialisasi politik masyarakat terhadap pemilukada. Selain itu radio swasta lebih segmentasi kepada masyarakat luas yang mendengarkan dibanding radio milik pemerintah sehingga dalam penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat bisa dipahami dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada kota Yogyakarta dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan media massa untuk membentuk, mempengaruhi, pendapat dan sikap dari khalayak pendengar setelah mereka mendengarkan informasi politik melalui siaran radio.

Atas dasar fakta bahwa radio swasta sangat berperan dan berpengaruh dalam pemilukada, maka penulis mengangkat masalah tersebut dalam penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana peranan radio siaran swasta dalam sosialisasi politik mengenai pemilukada kepada masyarakat?”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Teoritis

- a. Untuk mengetahui peranan salah satu media massa, dalam hal ini radio swasta yang digunakan sebagai sarana meningkatkan dan memberikan bekal pengetahuan mengenai pemilukada kota Yogyakarta kepada masyarakat melalui jalur nonformal.

- b. Untuk mengetahui peranan radio swasta dalam kaitannya dengan pengembangan kajian komunikasi politik.

2. Pragmatis

Untuk mengetahui tanggapan yang diberikan oleh masyarakat mengenai program atau acara radio siaran swasta yang berkaitan dengan pemilukada.

D . MANFAAT PENELITIAN

1. Dari sisi keilmuan diharapkan memperkaya literatur yang mengkaji masalah pemilukada, khususnya pemilukada kota Yogyakarta yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak (publik).
2. Memberikan masukan kepada pihak radio swasta sebagai media massa mengenai acara atau program yang menyampaikan informasi tentang pemilukada kota Yogyakarta.
3. Secara praktis masyarakat dapat mengetahui peran radio swasta dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemilukada kota Yogyakarta.
4. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan didalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Lahirlah kerangka dasar teori dibawah ini :

1. Media Massa

Kata media massa berasal dari medium dan massa, kata "medium" berasal dari bahasa latin yang menunjukkan adanya berbagai sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia, kata "massa" yang berasal dari daerah Anglosaxon berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat massif. Tugasnya adalah sesuai dengan sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu tipe baru dari komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari masyarakat dewasa ini.

Media massa merupakan sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Setiap jenis media massa mempunyai sifat-sifat khasnya oleh karena itu penggunaannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan kemampuan serta sifat-sifat khasnya.

Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian informasi melalui media massa, media massa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Media massa modern

Yang dimaksud media massa modern adalah media massa yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya terlebih dulu harus dicetak menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya surat kabar, majalah, tabloid dll.

Media massa elektronik adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi.

b. Media massa tradisional

Media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, seni tradisional dll.

2. Fungsi Media Massa

Media massa secara mandiri hanya sebagai penunjang memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai pemberi informasi

Dapat dilakukan sendiri oleh media. Tanpa media sangatlah mustahil informasi dapat disampaikan secara tepat tanpa terikat waktu.

b. Sebagai pengambilan keputusan

Dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan di samping itu diharapkan adanya perubahan sikap kepercayaan norma-norma sosial. Oleh sebab itu dalam hal ini mekanisme komunikasi antar pribadi sangat berperan. Media massa berperan dalam menghantarkan informasi sebagai bahan diskusi, memperjelas masalah-masalah dan menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat.

c. Sebagai pendidik

Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa sedangkan bagian lain dikombinasikan dengan komunikasi antar pribadi (**Eduard D, 1978:47**). Menurut Chalkley media massa berfungsi untuk:

1. Memberitakan tentang fakta kehidupan ekonomi masyarakat,
2. Menginterpretasikan fakta tersebut agar dipahami oleh masyarakat itu,
3. Mempromosikan hal tersebut agar menyadari betapa erius masalah yang dihadapi dan memikirkan lebih lanjut masalah itu serta mengantarkan masyarakat pada solusi-solusi yang mungkin ditempuh.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pers di negara kita diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966. Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan maka Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1967 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi

yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat cetak lainnya.

A. Muis menyatakan pers secara etimologis berasal dari bahasa Prancis “*preese*” berarti tekan atau cetak. dari bahasa Latin “*pressare*” dari kata “*premare*” “definisi terminologinya media massa cetak disingkat media cetak. bahasa Belandannya drukpers atau pers yang diartikan sebagai surat kabar atau majalah.

Menurut Totok Djuroto (2002 : 11) Pers merupakan kumpulan berita, *head line*, tajuk, artikel, cerita, iklan, karikatur dan informasi yang dicetak disuatu kertas yang berukuran plano, yang diterbitkan secara teratur (harian, mingguan, bulanan).

Secara umum didalam Undang-undang nomor 11 tahun 1966 yang kemudian diubah dengan Undang nomor 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, peranan dan fungsi pers adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya terutama mengenai tujuan-tujuan dan urgensi serta jalannya proses pembangunan dalam segala aspek.
2. Melakukan penerangan dalam arti memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan rakyat mengenai masalah-masalah pembangunan dalam arti luas.
3. Memberikan hiburan dalam arti penyegaran untuk memulihkan dan mempertinggi gairah hidup (optimisme) masyarakat.

4. Mendorong kegiatan kebudayaan dalam arti luas demi pembinaan kebudayaan bangsa untuk menyongsong tantangan dunia modern dengan tidak melupakan akar-akar kebudayaan asli yang terdapat pada rakyat.
5. Melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif dalam semua bidang kegiatan kehidupan bangsa antara lain dengan menggalakkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Menjadikan dirinya sebagai sarana perubahan dan modernisasi (**Sumono Mustofa, 1978: 34-35**).

Untuk dapat melakukan peranannya yang tepat, media harus senantiasa mengikuti dengan peka dan cermat perkembangan masyarakat dan perkembangan lingkungan sekitarnya termasuk perkembangan politik. Sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai *avant grade* bahkan harus sanggup membuat antisipasi terhadap perkembangan keadaan dengan mencoba membaca kecenderungannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pers.

1. Tempat hidup dan berkembangnya media tersebut. Karena dalam masyarakat peranan itu bukan hanya abstrak tetapi harus konkret.
2. Komitmen pada kepentingan bersama yang harus sanggup mengatasi komitmen akan kepentingan dan pertimbangan kelompok bukan dalam suatu hubungan yang kontradiktif.
3. Visi dan *editorial policy*, yang akan membedakan media cetak yang satu dengan media cetak yang lain dan juga menjadi pedoman serta kriteria dalam proses menyeleksi kejadian-kejadian dan permasalahan untuk diliput dan dijadikan pemberitaan (**Jacob Oetama, 2001 : 433**).

Karena sasaran penyampaian informasi adalah masyarakat luas, sedangkan media informasi baik media elektronik maupun media cetak jenisnya beragam dan informasi yang disampaikan tidak selalu memiliki aspek positif bagi pembangunan nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa;

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan dalam bagian menimbang sub (b) UU No. 3 Tahun 1989 yang menyatakan ;

"Bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara demi terwujudnya pembangunan nasional"

Pedoman bagi pemerintah, dalam hal ini departemen penerangan, dalam menyelenggarakan telekomunikasi tertuang dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 mengenai Penerangan, Komunikasi dan Media Massa sebagai berikut:

- a. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa diarahkan pada peningkatan kemampuan penerangan, komunikasi, dan media massa nasional, ditujukan untuk meningkatkan peran serta aktif positif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan keterbukaan yang bertanggung jawab dan makin meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 45.
- b. Pembangunan penerangan, komunikasi, media massa harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya

interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab antara sesama warga masyarakat dengan pemerintah dalam memperoleh informasi tentang pembangunan dan hasil-hasilnya, serta perkembangan global sehingga makin meningkatkan kualitas, peranan, peran serta, dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian serta ketangguhan bangsa.

- c. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mendukung upaya memantapkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, memperkuat moral, mental, budaya bangsa serta menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, dan menggairahkan peran serta masyarakat dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila sehingga masyarakat siap untuk makin mampu menyerap nilai yang positif dan menangkal pengaruh negatif arus informasi. Untuk itu, media massa harus makin meningkatkan pengabdian, tanggung jawab dan etik profesi, kemampuan, dan kualitas sumberdaya manusianya, serta makin mampu meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dengan lebih efektif dan efisien.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi dan mediamassa perlu makin ditingkatkan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi sehingga mampu menjangkau dan menjamin lancarnya penyebaran informasi secara luas serta dapat mewujudkan tersedianya wahana komunikasi dan informasi yang andal serta tersebar makin merata di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan tuntutan pembangunan.

- e. Dalam rangka peningkatan peranan media massa yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila perlu terus diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara media massa, pemerintah, dan masyarakat sehingga dapat makin diwujudkan peran serta aktif media massa dalam mendukung pembangunan menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat serta memperluas komunikasi dan peran serta positif masyarakat. Untuk itu kelangsungan hidup media massa yang bebas dan bertanggung jawab dijamin oleh Undang-Undang.
- f. Upaya penyebarluasan peran media massa, baik cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, film, video, multi media, surat kabar, majalah, dan kantor berita perlu terus ditingkatkan baik dalam jumlah, kualitas maupun jangkauannya termasuk media tradisional sehingga makin dapat dicapai tujuan penyebaran informasi yang lebih efektif sesuai dengan kebhinekaan masyarakat Indonesia di perkotaan dan perdesaan guna mendukung makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan itu perlu terus dikembangkan dan dilindungi kehidupan pers daerah sehingga mampu berkembang dan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab.
- g. Peningkatan peranan media massa dalam pembangunan perlu terus didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga terdidik dan profesional, yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi sebagai insan media massa yang memiliki idealisme, integritas, dan wawasan kebangsaan serta pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan

dalam pengabdian terhadap profesi disertai peningkatan kesejahteraannya. Lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang media massa perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan Negara.

- h. Pembinaan dan pengembangan film nasional ditingkatkan fungsi dan perannya secara terus menerus baik kualitas maupun kuantitasnya yang dititik beratkan pada kemampuan bersaing dengan menekankan peningkatan film yang berkualitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, terciptanya iklim yang mendukung peningkatan produksi serta perlindungan film nasional.
- i. Peranan penerangan, komunikasi, dan media massa didalam pergaulan internasional perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengembangkan citra dan pengertian dunia terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.
- j. Pembangunan aparat dan pelaku penerangan, komunikasi, dan media massa terus ditingkatkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terdidik yang profesional, mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki idealisme, integritas moral, kepribadian, dan semangat kebangsaan, disertai dengan pengembangan dan peningkatan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik dan perlindungan terhadap masyarakat agar mendapat informasi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Pembangunan hubungan kemasyarakatan sebagai pengemas dan penyalur informasi terus ditingkatkan untuk menumbuhkan iklim komunikasi dua arah, memantapkan suasana keterbukaan yang bertanggung jawab, dan makin membina citra positif bangsa dan negara baik di dalam maupun di luar negeri. Penataan struktur, wewenang, dan pembinaan sumber daya hubungan kemasyarakatan terus dikembangkan sesuai dengan jati diri bangsa.
- l. Pembangunan periklanan nasional terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara positif dan kreatif untuk mendinamiskan kegiatan perekonomian masyarakat tentang pembangunan, mengimbangi dan menangkal pengaruh negatif pesan komunikasi pemasaran, meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri, dan memantapkan daya saing produk nasional.

Pada pendidikan nonformal perlu diperhatikan penyusunan dari naskah-naskah yang mudah dibaca dan dipahami, dengan mengingat keadaan setempat, penggunaan bahasa daerah dalam penyusunan naskah-naskah tersebut perlu memperoleh perhatian agar langsung mencapai sasaran.

Mengingat kemajemukan masyarakat kita, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, adat istiadat, letak geografis dan sebagainya maka cara-cara menanamkan pengertian tersebut harus berbeda-beda pula (Koesnadi, 1988 : 201).

2. Komunikasi politik

Berbicara tentang peranan pers dalam proses demokratisasi, maka tidak akan terlepas dari berbicara masalah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem politik tersebut dengan lingkungannya. Dalam suatu sistem politik komunikasi politik juga sebagai penghubung antara situasi kehidupan yang ada pada supra struktur dan infra struktur politik untuk menciptakan kondisi politik yang stabil (**Harsono Suwardi, 1993 : 45**).

Richard Fagen mengatakan bahwa komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa konsekuensi-konsekuensi politik baik yang actual maupun yang potensial didalam suatu sistem politik yang ada. Lebih jauh Arranguren mengatakan bahwa komunikasi politik tidak lain adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik (terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti luas) dari suatu sumber kepada sejumlah sasaran dengan tujuan yang pasti. Sedangkan Dennis Mc Quail menyatakan, mengingat keaneka ragaman dalam definisi komunikasi politik maka ia tidak memberikan batasan komunikasi politik secara tegas, tetapi Mc Quail menjelaskan bahwa yang terpenting didalam komunikasi politik adalah pesan-pesan politik, yang mana suatu bentuk komunikasi akan mempunyai arti politik apabila informasi yang disampaikan memberikan tekanan pada makna isi pesan politik tersebut (**Harsono Suwardi, 1993 : 42-43**).

Astrid Suseno memberikan pengertian komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warga melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Selanjutnya Rusadi Kantaprawira menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah untuk menghubungkan fikiran politik yang hidup dalam sektor kehidupan masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah **(Jalaludin Rahmad, 1996 : 4)**.

Banyak batasan mengenai komunikasi politik yang diberikan para ahli, seperti halnya Dan Nimmo yang terlebih dahulu memaknai politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka dalam kondisi penekanan pada efek yang muncul pada komunikan sebagai akibat penyampaian suatu pesan. Sehingga pada akhirnya Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang dianggap politis atas dasar konsekuensi-konsekuensi aktual dan potensial yang mengatur perbuatan atau perilaku manusia dalam kondisi-kondisi konflik **(Dan Nimmo, 2000 : 9)**.

Hakikat komunikasi dalam arti luas adalah suatu kegiatan manusia baik secara pribadi maupun kolektif sebagai masyarakat untuk menyebarluaskan gagasan atau pikiran, fakta ataupun data agar gagasan, fakta dan data tersebut menjadi milik bersama.

Dalam batasan ini komunikasi juga berfungsi sebagai usaha untuk:

1. Member informasi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan penyebarluasan berita, gambar, fakta dan pesan, pendapat serta tanggapan yang diperlukan untuk mengerti dan menanggapi sesuatu keadaan.
2. Memasyarakatkan yakni memberi bekal pengetahuan untuk menjadi milik bersama masyarakat agar masing-masing warganya dapat secara efektif melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat dalam rangka membina kebersamaan hidup dan solidaritas sosial.
3. Mengembangkan motivasi yakni merangsang gairah orang atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan aspirasi bersama.
4. Memberi pendidikan dalam rangka pengembangan kecerdasan intelektual, pembinaan watak dan memperoleh keterampilan pada semua tingkat umur.
5. Mengembangkan kebudayaan yakni menyebarluaskan hasil ciptaan seni budaya dengan maksud untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang, mengembangkan kebudayaan dengan meluaskan cakrawala pandangan masyarakat, mengasah daya ciptanya dan merangsang tumbuhnya kreativitas.
6. Memberikan hiburan dengan antara lain mementaskan atau mengembangkan seni drama, seni tari, seni sastra, seni lukis, seni musik, seni lawak, olah raga dan lain-lain untuk dapat dinikmati secara pribadi atau secara bersama-sama.
7. Mengembangkan integrasi ke arah kokohnya persatuan dan kesatuan nasional serta mantapnya, tanggung jawab disiplin dan jiwa bangsa.

Dalam proses komunikasi ada 3 unsur pokok:

1. Pemberi atau sumber informasi.
2. Media informasi.
3. Penerima atau sasaran informasi.

Sebagai media komunikasi politik, media dapat berkaitan dengan demokratisasi. Demokratisasi adalah usaha atau proses penerapan kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik sehingga terciptanya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

Menurut Riswanda Imawan (**AIPI, 2002 : 47**) demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter kearah struktur dan tatanan pemerintahan yang demokratis. Dimana pada demokratisasi adanya proses diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga Negara serta memperluas hak warga Negara untuk bersuara dan berpendapat.

Kaidah atau nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan yang ada dalam era demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.

Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakannya kepada perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan. Sebab kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktator.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri serta ketiadaan pergantian pemimpin dalam jangka waktu tertentu dianggap tidak wajar dalam demokrasi.

4. Membatasi kekerasan sampai tingkat minimum.

Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dalam hal ini semua masyarakat mempunyai hak-hak yang sama serta adanya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa(Miriam Budiarjo, 2003 : 62-63).

3. Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Menurut Rachman menjelaskan dari pengertian sosialisasi politik berasal dari dua kata yaitu sosialisasi dan politik. Sosialisasi berarti pemasyarakatan dan politik berarti urusan negara. Jadi secara etimologis sosialisasi politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan Negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan menurut Michael Rush dan Phillip Althoff menjelaskan sosialisasi politik adalah proses pengaruh yang dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik juga sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan keyakinan-keyakinan politiknya kepada generasi sesudahnya. Sosialisasi politik ini merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan dan memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya(Joko Prihatmoko, 2005 : 54).

Sosialisasi politik mempunyai tujuan menumbuh kembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, *administrative, judicial* tertentu.

2. Agen-agen Sosialisasi Politik

Menurut Tischler yang menjadi agen atau perantara dalam proses sosialisasi meliputi :

1. Keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur social yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Bagi keluarga inti (*nuclear family*) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (*extended family*), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Fungsi keluarga antara lain:

1. Pengaturan seksual
2. Reproduksi
3. Sosialisasi
4. Pemeliharaan

5. Penempatan anak di dalam masyarakat

6. Pemuas kebutuhan perseorangan

7. Kontrol sosial

2. Teman Pergaulan

Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu.

3. Lembaga pendidikan formal (sekolah)

Lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga sekolah dirasa sebagai tempat yang cukup efektif dalam mendidik seorang anak untuk memupuk rasa tanggung jawab untuk kewajiban dan haknya.

4. Media massa

Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan.

5. Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

6. Partai Politik

Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

7. Agen-agen lain

Selain keluarga, sekolah, kelompok bermain dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasi, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat persepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini sangat besar.

Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh faktor interaksi pengalaman-pengalaman seseorang dalam keluarga, tempat tinggal, pendidikan dan pergaulannya. Karena hal ini yang sangat berperan membentuk karakter anak untuk dewasa nantinya.

4. Pemilu

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 dan 2, bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih Wakil-Wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Fungsinya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan(Sanit, 1997:85).

Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan memikul tanggung jawab kekuasaan dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan daerah. Dimana asas-asas yang yang dimaksud adalah:

1. Langsung yaitu warga negara sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum yaitu setiap warga negara tidak peduli kaya atau miskin, apapun sukunya, ras, agama, warna, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, cacat tubuh dan apapun ideologinya. Hal ini dimaksudkan sebagai persamaan kedudukan setiap warga Negara sama di depan hukum dan pemerintahan.
3. Bebas yaitu ada dua pengertian disini, dimana bebas untuk mengandung maksud setiap warga Negara yang berhak memilih dan di pilih memiliki kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi dan pilihannya. Kemudian bebas untuk menghadiri atau mendengarkan kampanye para calon pasangan Kepala Daerah. Dalam hal ini bebas dari intimidasi dari paksaan dalam bentuk apapun.
4. Rahasia yaitu merujuk pada situasi pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Asas rahasia ini tidak berlaku bila pemilih yang bersangkutan dengan kesadaran sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain.
5. Jujur yaitu setiap tindakan pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara, korupsi. Hal ini tidak

saja berlaku bagi penyelenggara tetapi bagi peserta, para kandidat, pemantau, para pemilih dan penegak hukum.

6. Adil yaitu merupakan cita-cita demokrasi dalam segala bentuknya. Dalam kampanye keadilan sangat penting dan harus dijunjung tinggi. Karena keadilan menjadi dasar kompetisi yang sehat. Dengan keadilan, gesekan dan konflik antar pendukung dan antar calon bisa dihindarkan(Joko Prihatmoko,2005:110).

Pemilihan Kepala Daerah langsung, menjadikan rakyat tidak menjadi penonton lagi atas proses politik yang akan menentukan nasib mereka. Sebaliknya, pemilukada telah menempatkan rakyat dalam posisi yang lebih tinggi dan terhormat, karena mereka menjadi pemutus akhir siapa yang layak menjadi pemimpin.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini dan memudahkan analisa serta agar didapat suatu pemahaman yang sama maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Media Massa

Media massa adalah sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia yang mempunyai sifat massif.

2. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam sistem politik yang bertugas menyalurkan dan menyampaikan aspirasi politik maupun kepentingan politik. Melalui komunikasi politik rakyat dapat memberikan input dan menerima output.

3. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pengaruh yang dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

4. Pemilu

Pemilu adalah proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih Wakil-Wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Dimana dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Radio Swasta dalam sosialisasi politik masyarakat terhadap pemilu Kota Yogyakarta.

Dalam hal ini definisi operasional yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Peranan Radio Swasta

Peranan radio swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dilakukan oleh radio sebagai sebuah alat dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilu kota Yogyakarta. Secara umum radio mempunyai banyak peranan, namun peranan-peranan radio yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Radio swasta sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
- Berdasarkan waktu/durasi program
 - Berdasarkan pilihan gelombang radio swasta
 - Berdasarkan alasan memilih radio swasta
 - Berdasarkan informasi
 - Berdasarkan pengetahuan
 - Berdasarkan intensitas
 - Berdasarkan pemahaman
 - Berdasarkan efektifitas sosialisasi
 - Berdasarkan hak pilih
 - Berdasarkan pilihan

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Analisa Data

1. Metode analisa deskriptif yaitu cara penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain, dalam hal ini hubungan program atau mata acara yang berkaitan dengan radio siaran swasta dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemilu kota Yogyakarta.
2. Metode analisa kualitatif yaitu cara penelitian yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata untuk dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Kedua metode di atas digunakan karena maksud penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran serta radio siaran swasta dalam sosialisasi politik masyarakat terhadap pemelukada yang berlangsung di kota Yogyakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan cara:
 - a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang ditujukan kepada Radio Siaran Swasta
 - b. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara langsung kepada responden.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui:
 1. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait.
 2. Literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek dan masalah penelitian.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 2011: 248).

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
 - b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuan, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut "label"
3. Sintesisasi
 - a. Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama label lagi.

4. Menyusun “hipotesis kerja”

Hal ini dilakukan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data.

4. Penentuan Sampel dan Lokasi Penelitian

1. Penentuan lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode nonprobability sampling yaitu pemilihan sampel didasarkan atas pengetahuan bahwa radio siaran swasta tersebut memiliki program atau acara yang berkaitan dengan pemelukada kota Yogyakarta. Sedangkan penentuan sampel menggunakan Teknik *nonprobability sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan atas pengetahuan masyarakat bahwa radio siaran swasta tersebut memiliki program atau cara yang berkaitan dengan pemelukada kota Yogyakarta.

Penelitian dilakukan di:

1. Radio-radio siaran swasta di Kota Yogyakarta,

Dalam penelitian ini sampel radio siaran swasta yang dipilih adalah:

- a. Geronimo (FM)
- b. Unisi (FM)
- c. Prambors (FM)

Adapun alasan penulis untuk memilih tiga radio tersebut karena radio swasta tersebut memiliki program atau acara yang berkaitan dengan pemelukada kota Yogyakarta.

2. Masyarakat pendengar siaran.

Dalam penelitian ini masyarakat digolongkan kedalam:

a. Masyarakat umum yang terdidik

Karena dalam program atau acara yang berkaitan dengan pemelukada kota Yogyakarta yang disiarkan radio swasta membutuhkan tingkat pemahaman mengenai apa yang disampaikan.

b. Mahasiswa atau pelajar.

Mengingat bahwa Yogyakarta pendengarnya kebanyakan dikenal dari golongan ini.

2. Penentuan sampel.

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah rumus Taro Yamane(**Rahmad Jalalludin, 1991:81**) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N (d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu pada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah 208.132 jiwa. Maka sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak :

$$n = \frac{208132}{208132 (0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{208132}{208132 (0.01)+1}$$

$$n = \frac{208132}{2082.32}$$

$$= 99.95$$

Jadi sampel yang di gunakan untuk menjadi responden dalam penelitian ini di bulatkan menjadi 100 orang.

Teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik *Cluster Random Sampling* yaitu teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Populasi dari cluster merupakan sub populasi dari total populasi. Pengelompokan secara cluster menghasilkan unit elementer yang heterogen seperti halnya populasi. Adapun rinciannya yaitu :

Tabel 1.1

Pembagian jumlah responden untuk masing-masing kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Mantrijeron	9
2.	Kraton	6
3.	Margangsan	8
4.	Pakualaman	3
5.	Gondomanan	4
6.	Ngampilan	4
7.	Wirobrajan	7
8.	Gedongtengen	5
9.	Jetis	6
10.	Tegalrejo	9
11.	Danurejan	5
12.	Gondokusuman	10
13.	Umbulharjo	15
14.	Kotagede	9
	Jumlah	100

Sumber data : Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing kecamatan memiliki responden yang berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan dalam menentukan jumlah responden yaitu dengan menghitung jumlah suara sah dikali 100 jumlah sampel dibagi 100%. Kemudian dalam menentukan teknik *cluster random sampling* penulis berusaha memetakan dari atas hingga bawah dengan menggunakan arisan. Misalnya untuk menentukan jumlah responden yang ada di masing-masing kecamatan penulis mengambil langkah memilih 2 kelurahan yang ada, kemudian dari 2 kelurahan ditentukan desanya, kalau sudah ditemukan maka langkah terakhir adalah penentuan RT dengan cara arisan, yaitu memilih secara acak RT mana yang akan dijadikan target dalam penyebaran

kuesioner. Sehingga dalam penentuan jumlah sampel dan penentuan siapa yang menjadi responden itu tidak asal-asalan melainkan dengan menggunakan perhitungan yang rinci dan jelas.